



PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS DATA



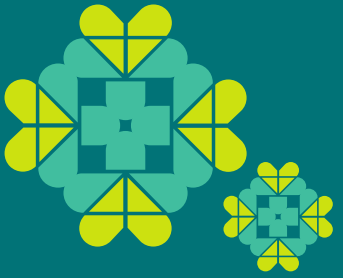
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



Outline

- 1. Pendahuluan**
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan
- 2. Penilaian Kualitas Data Agregat**
 - a. Telaah data
 - b. Verifikasi data
 - c. Monitoring dan evaluasi
- 3. Penilaian Kualitas Data Individu**
 - a. Sistem dengan data individu
 - b. Standar penilaian data individu
- 4. Peningkatan Kualitas Data**





PENDAHULUAN

Latar Belakang

- Data berperan penting dalam perencanaan, monitoring evaluasi, dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan
- Data yang berkualitas penting untuk memantau kemajuan indikator kesehatan seperti SDGs, indikator kesehatan global (WHO), dan target kesehatan nasional atau sub-nasional
- Kualitas data menjadi salah satu domain dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
- Kualitas data menjadi salah satu indikator dalam RPJMN 2025 (Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan Kesehatan)



PENILAIAN KUALITAS DATA

Penilaian kualitas data rutin (PKDR) merupakan **metode evaluasi cepat** terhadap kualitas data kesehatan

Penilaian kualitas data dapat dilakukan untuk data **agregat** dan data **individu**

Penilaian kualitas data dilakukan secara **kualitatif** dan **kuantitatif**





Revisi Juknis Kualitas Data, Dimana Ada Adjustment Threshold

Link unduh:

<https://kemkes.go.id/id/media/list/pedoman/petunjuk-teknis/petunjuk-teknis-peningkatan-kualitas-data-bidang-kesehatan-2023>



PENILAIAN KUALITAS DATA AGREGAT

Telaah Data

penilaian data agregat yang dilakukan di meja kerja tanpa harus turun lapangan.

Verifikasi Data

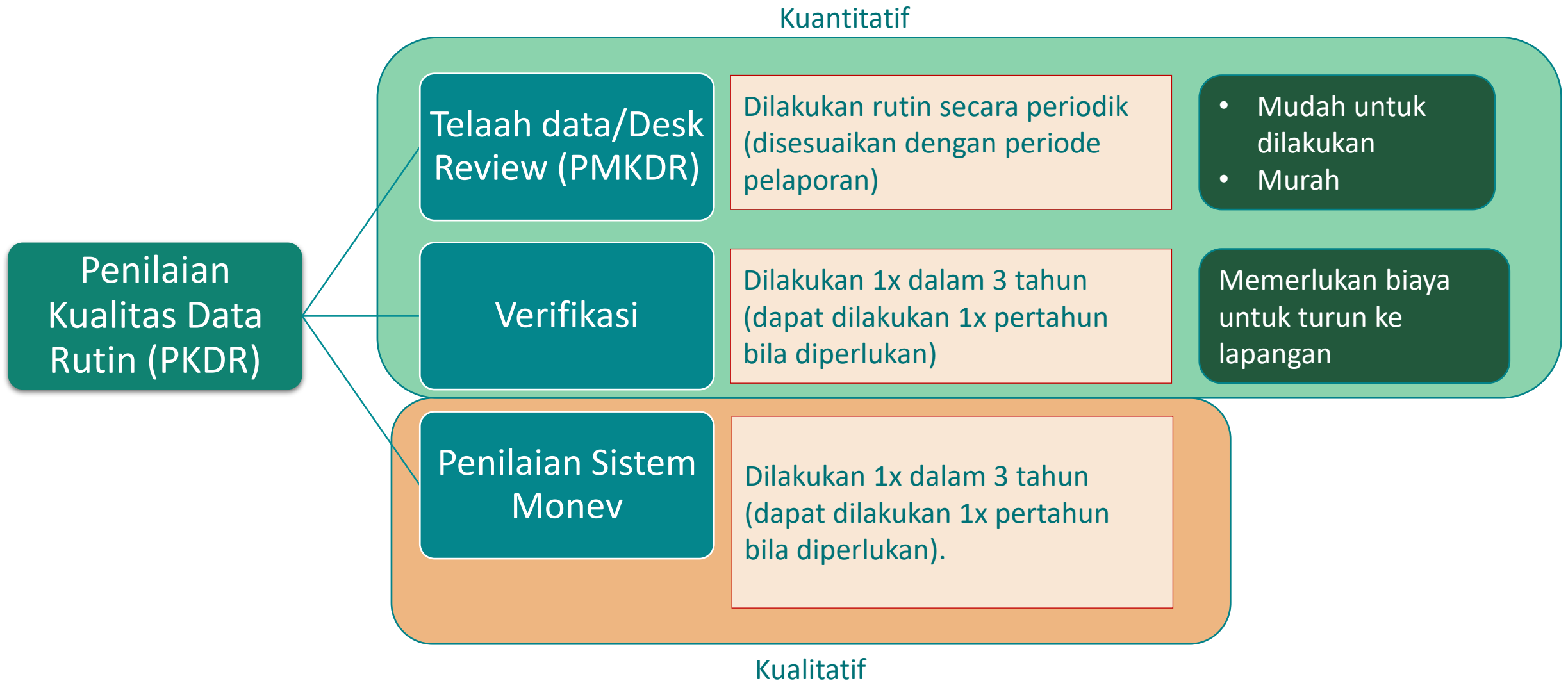
proses pemeriksaan keakuratan data langsung kepada sumber datanya

Monitoring dan Evaluasi

penilaian kualitas data secara kualitatif, yang dilakukan dengan menjawab serangkaian pertanyaan dalam bentuk check list yang mencakup 6 aspek penilaian



Konsep Penilaian Kualitas Data Kesehatan



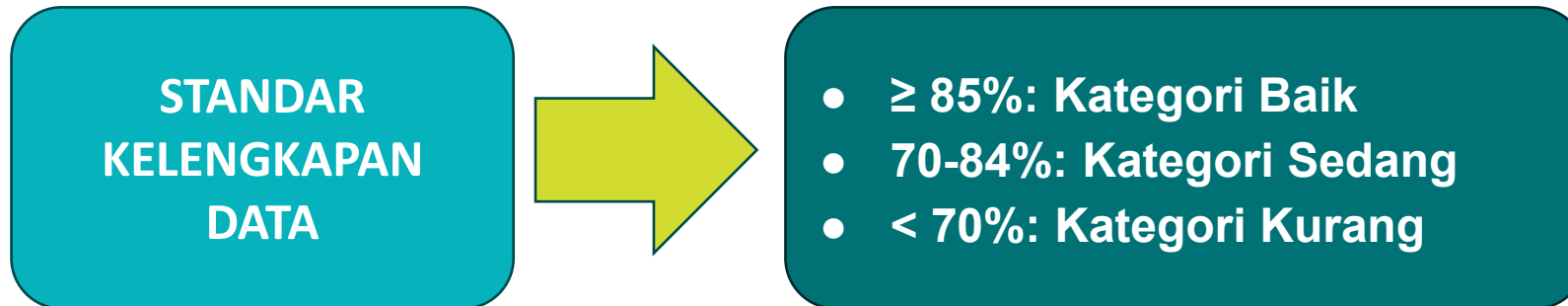
TELAAH DATA

- Kegiatan telaah data ini dilakukan untuk melihat kesenjangan, outlier, dan inkonsistensi untuk indikator prioritas pada program kesehatan.
- Dimensi kualitas data yang dapat dinilai dalam proses telaah data adalah:
 - **Kelengkapan**
 - **Ketepatan waktu**
 - **Konsistensi internal**
 - **Konsistensi eksternal**
 - **Pencilan (outlier)**



KELENGKAPAN DATA

Kelengkapan data dinilai dengan mengukur apakah semua unit (fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan) yang seharusnya melaporkan data, telah melaporkan datanya. Kelengkapan data dapat dinilai dari aspek kelengkapan unit yang melapor, kelengkapan periode pelaporan, dan kelengkapan data indikator.



Contoh Penilaian Kelengkapan Data Unit Melapor Bulanan



Kab/ Kota	Bulan												Total	Tingkat Kelengkapan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	Y	Y		Y	Y	Y	Y		Y		Y	Y	9	75%
B	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	11	92%
C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	12	100%
D	Y		Y	Y		Y		Y	Y	Y	Y		8	67%
E	Y		Y		Y		Y	Y			Y	Y	7	58%
Nasional	5	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	40	67%

Kelengkapan berdasarkan periode pelaporan dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah laporan yang diterima dari unit yang melapor selama rentang periode pelaporan}}{\text{Jumlah unit dikalikan periode pelaporan}} \times 100\%$$

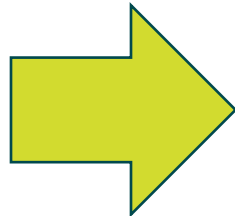
Kabupaten A melapor sebanyak 9 bulan, maka tingkat kelengkapan pelaporan kabupaten A adalah $9/12 \times 100\% = 75\%$.

Untuk melihat kelengkapan secara nasional, total jumlah pelaporan dari seluruh kabupaten/kota (A+B+C+D+E) dibagi dengan jumlah kabupaten/kota dikalikan dengan periode pelaporan, yaitu $((9+11+12+8+7))/((5 \times 12)) \times 100\% = 67\%$. Dengan persentase ini, kelengkapan data berdasarkan periode bulanan masih tergolong kategori Kurang ($<70\%$).

KETEPATAN WAKTU

Ketepatan waktu didefinisikan sebagai jumlah laporan dari unit yang melapor tepat waktu (sesuai ketentuan) dibagi dengan jumlah unit yang seharusnya melapor.

**STANDAR
KETEPATAN WAKTU**



- **Puskesmas tanggal 5**
 - **Dinkes Kab/kota tanggal 10**
 - **Dinkes Prov tanggal 15**
- (sesuai Permenkes No 92 tahun 2016)



Contoh Penilaian Ketepatan Waktu

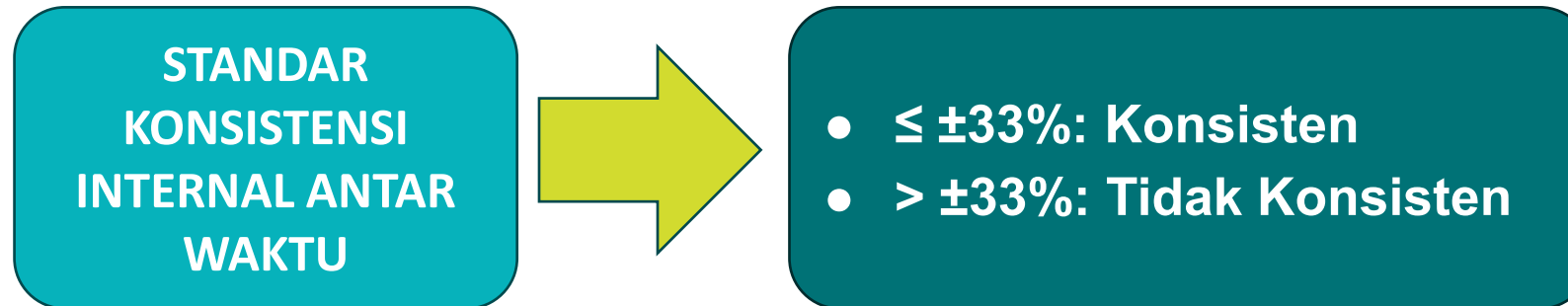


Fas-kes	Mengumpulkan ke Dinkes Kab./Kota												Persentase timeliness
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
A	4	6	5	4	6	5	5	4	4	5	5	6	75%
B	4	5	4	4	5	5	6	7	5	6	5	5	75%
C	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	100%
D	5	4	5	10	5	4	5	5	5	4	5	4	91,67%

Faskes A, B, dan D memiliki persentase timeliness kurang dari 100%. Hal ini terlihat pada beberapa bulan tanggal pengumpulan laporan yang melebihi dari tenggat waktu yang ditentukan.

KONSISTENSI INTERNAL ANTAR WAKTU

Konsistensi antar waktu dilihat dengan cara membandingkan angka pada tahun yang akan dianalisis dengan rata-rata angka pada indikator yang sama pada tiga tahun sebelumnya.



Contoh Penilaian Konsistensi Internal Antar Waktu



Kab./ Kota	Tahun				Rata-rata 2020-2022	Rasio dari tahun 2023 dengan rata-rata 2020-2022	%Perbedaan antara nasional dengan rasio kabupaten/kota
	2020	2021	2022	2023			
A	30242	29543	26848	32377	28878	1,12	-3,34
B	19343	17322	16232	18819	17632	1,07	-7,75
C	7512	7701	7403	7881	7539	1,05	-9,48
D	15355	15047	14788	25123	15063	1,67	43,96
E	25998	23965	24023	24259	24662	0,98	-15,51
Nasional	98450	93578	89294	108459	93774	1,16	

Setiap perbedaan antara rasio kabupaten dan nasional yang memiliki nilai $\geq 33\%$ ditunjukkan dengan warna merah.

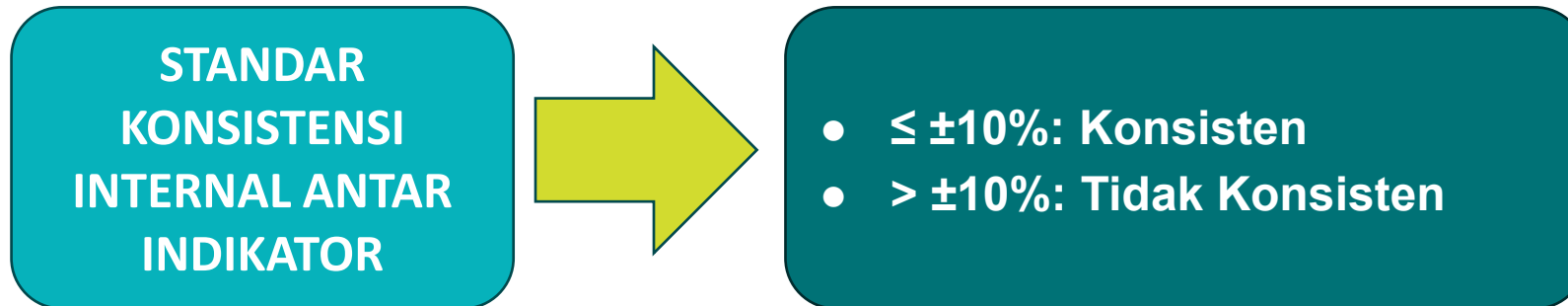
Hasil perhitungan pada Kabupaten A (-3,44), B (-7,75), C (-9,48), dan E (-15,51) dapat diartikan bahwa data imunisasi DPT-1 tahun 2023 dengan data rata-rata tahun 2020-2022 imunisasi DPT-1 konsisten karena berada dalam rentang $\pm 33\%$. Sementara untuk Kabupaten D (43,96) tidak konsisten karena berada di luar rentang $\pm 33\%$.

Persentase Rasio Perbedaan dihitung dengan rumus:

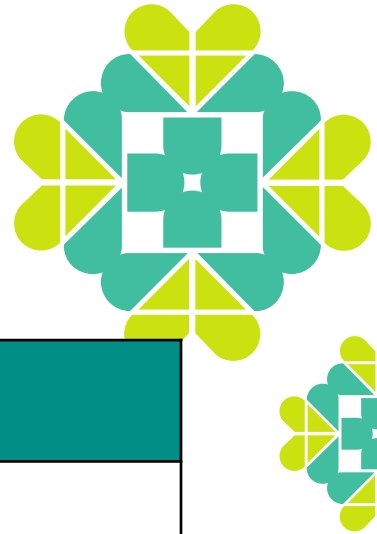
$$\frac{\text{Rasio Kab/Kota} - \text{Rasio Nasional}}{\text{Rasio Nasional}} \times 100\%$$

KONSISTENSI INTERNAL ANTAR INDIKATOR

Konsistensi antar indikator dilihat dengan cara membandingkan indikator program yang memiliki hubungan untuk menentukan apakah hubungan antara indikator tersebut konsisten atau sesuai dengan yang diharapkan



Matriks Konsistensi Internal - Antar Indikator



Matriks Kualitas Data	Definisi	
Konsistensi antar indikator yang berkaitan	Kesehatan maternal Kunjungan K1 - pemeriksaan HIV pada bumil (seharusnya kurang lebih sama)	Dimana terdapat perbedaan $\geq \pm 10\%$
	Imunisasi DPT3 dng DPT1 dng Campak rubella 1	
	TB Notifikasi kasus TB - kasus TB dalam pengobatan (seharusnya kurang lebih sama)	
	Malaria Kasus malaria terkonfirmasi yang dilaporkan - kasus yang diuji (seharusnya kurang lebih sama)	



Contoh Penilaian Konsistensi Internal Antar Indikator

Kab/ Kota	K1	Pemeriksaan HIV pada bumil	Rasio K1 terhadap Pemeriksaan HIV pada bumil	% Rasio perbedaan antara nasional dan kabupaten/kota
A	20995	18080	1,16	-1,69
B	18923	16442	1,15	-2,54
C	7682	6978	1,10	-6,77
D	12663	9577	1,32	11,86
E	18214	15491	1,18	0
Nasional	78477	66548	1,18	

Persentase Rasio Perbedaan dihitung dengan rumus:

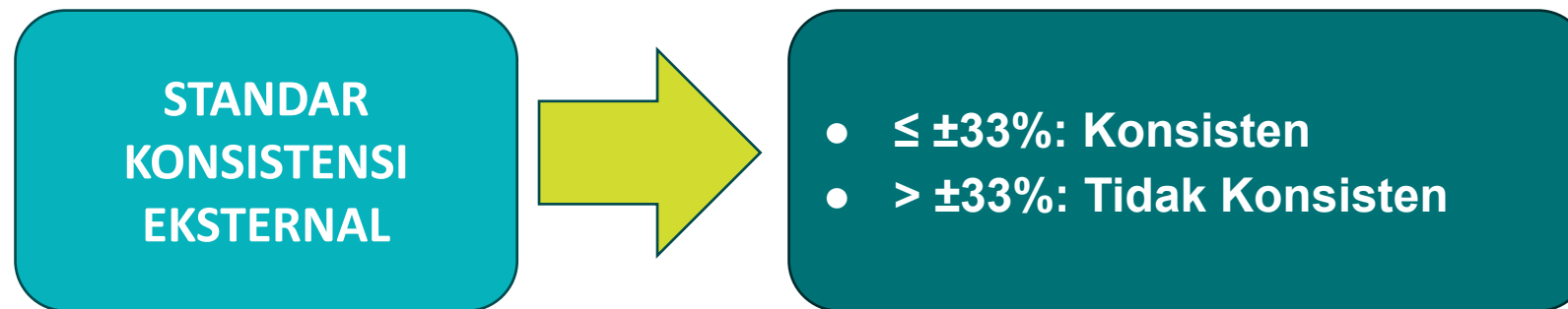
$$\frac{\text{Rasio Kab/Kota} - \text{Rasio Nasional}}{\text{Rasio Nasional}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan pada kab/kota A (-1,69), B (-2,54), C (-6,77), dan E (0) dapat diartikan bahwa indikator antara K1 dan Pemeriksaan HIV pada bumil konsisten (dalam rentang ±10%).

Sementara untuk kab/kota D (11,86) tidak konsisten antara indikator K1 dan Pemeriksaan HIV pada bumil karena berada diluar rentang ±10%.

KONSISTENSI EKSTERNAL

- Konsistensi eksternal mengukur kesesuaian data dengan membandingkan data dari 2 sumber data yang memiliki indikator kesehatan yang sama.
- Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan data antar sistem informasi kesehatan (misalnya data ibu hamil K1 di ASDK dengan e-kohort KIA) atau membandingkan antara data rutin dengan data survei misalnya data stunting dari data rutin dengan hasil SSGI



Contoh penilaian konsistensi eksternal



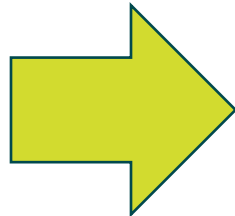
Nama Kab	Cakupan K1 dari ASDK	Cakupan K1 dari survei	Rasio Cakupan K1 dari ASDK terhadap survei	Selisih dengan 1	% perbedaan
Kab A	1,05	0,95	1,1	0,1	10%
Kab B	0,91	0,97	0,94	0,06	6%
Kab C	1,39	0,9	1,54	0,54	54%
Kab D	0,76	0,95	0,8	0,2	20%
Kab E	0,96	0,8	1,2	0,2	20%
Kab F	1,38	0,92	1,5	0,5	50%

Kabupaten C dan F memiliki % perbedaan sebesar 54% dan 50%. Sedangkan ambang batas pada konsistensi eksternal yaitu <33%, sehingga disimpulkan kabupaten C dan kabupaten F memiliki data cakupan K1 yang tidak konsisten antara kedua sumber data tersebut.

KEBERADAAN OUTLIER (PENCILAN)

Keakuratan data yang diukur dengan menilai ada atau tidaknya pencilan. Pencilan data dinilai dari penyimpangan data dari nilai rata-ratanya (mean).

STANDAR KEBERADAAN OUTLIER



- Ekstrim: Nilai data > 3 standar deviasi dari rata-rata
- Sedang/moderate: Nilai data 2-3 standar deviasi dari rata-rata



Contoh Penilaian Keberadaan Pencilan



Kab. /Kota	Bulan												Total	% Outlier
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	2543	2482	2492	2574	3012	2709	3019	2750	3127	2841	2725	2103	1	8,3%
B	1184	1118	1195	1228	1601	1324	1322	711	1160	1178	1084	1112	2	16,7%
C	776	541	515	527	857	782	735	694	687	628	596	543	0	0%
D	3114	2931	2956	4637	6288	4340	3788	3939	3708	4035	3738	3606	1	8,3%
E	1382	1379	1134	1378	1417	1302	1415	1169	1369	1184	1207	1079	0	0%
Nasio nal	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	4	6,7%

Kabupaten C dan E tidak ada data pencilan (0%). Sementara Kabupaten A (8,3%), B (16,7%), D (8,3%) memiliki data pencilan. Secara nasional, data Imunisasi BCG tidak akurat karena memiliki pencilan sebesar 6,7%.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

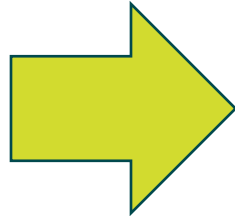
Xi = Nilai yang dilaporkan
X = Rata-rata semua nilai
n = Jumlah data

SD = Standar Deviasi

VERIFIKASI DATA

- Proses verifikasi data di lapangan akan melalui perhitungan rasio antara data yang masuk dari sumber data dengan data yang dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi
- Setelah dilakukan telaah data, jika ditemukan data pelaporan yang tidak sesuai atau membutuhkan konfirmasi, dapat dilanjutkan dengan melakukan verifikasi data dengan ketentuan minimal 30% unit untuk diverifikasi datanya
- Pertimbangan pemilihan daerah atau faskes yang akan diverifikasi bisa berdasarkan banyaknya hasil telaah data yang tidak sesuai di wilayah atau faskes

**STANDAR AKURASI
(RASIO VERIFIKASI)**



- **Akurat: 0,9-1,1**
- **Underreporting: > 1,1**
- **Overreporting: < 0,9**





Rasio Akurasi (%) dilakukan dengan membandingkan data hasil cakupan program yang dihitung ulang dari sumber data yang masuk di tiap jenjang (numerator) dengan data yang dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi (denominator), dalam satuan persen.

Akurat

- Jika data hasil faktor verifikasi sama dengan data yang dilaporkan atau memiliki rasio sebesar **0,9 - 1,1**

Under Reporting

- Jika data hasil faktor verifikasi lebih tinggi atau lebih dari data yang dilaporkan dengan rasio **>1,1**

Over Reporting

- Jika data hasil faktor verifikasi lebih rendah atau kurang dari data yang dilaporkan dengan rasio **< 0,9**

Contoh Verifikasi Data



Data Kunjungan K1 Ibu Hamil	Januari	Februari	Maret	Faktor Verifikasi
Data dari E-Kohort	38	32	35	105
Data dari pencatatan ulang	37	32	35	104
	$37/38=0,97$	$32/32= 1,00$	$35/35= 1,00$	$104/105=0,99$

Pada tabel disajikan contoh hasil verifikasi data kunjungan K1 ibu hamil di Sumatera Barat pada tahun 2023. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa data kunjungan K1 Ibu hamil di Tahun 2023 pada bulan Januari, Februari, dan Maret pada wilayah Sumatera Barat memiliki nilai yang akurat.

Teknis Kegiatan Verifikasi Data



1. Tetapkan data yang akan diverifikasi (d disesuaikan dengan hasil telaah data): misalnya Kunjungan Ibu Hamil (K6), Persalinan di Fasyankes, Imunisasi Campak Rubella, Imunisasi Dasar Lengkap
2. Data disandingkan antara data yang dilaporkan dengan data yang tersedia di dinas, contoh data yang sudah dilaporkan ke pusat disandingkan dengan data yang tersedia di dinas kesehatan provinsi (dilakukan penghitungan ulang data yang ada di dinkes provinsi). Sebagai catatan, data yang dapat dibandingkan dalam verifikasi adalah data absolut (bukan capaian)

Contoh Verifikasi Provinsi



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Variabel	Provinsi	Data yang Tersedia di Pusat 2023												Data yang Tersedia di Dinkes Provinsi 2023													
2			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
3																												
4	Kunjungan Ibu Hamil (K6)	Aceh	3.705	4.670	4.197	4.364	6.400	4.289	4.982	4.739	4.528	5.819	6.145	8.562	62.400	5.294	7.354	5.294	5.385	5.272	5.341	5.344	5.341	5.410	5.341	5.340	7.353	68.069
5		Sumatera Utara	17.722	19.024	19.611	19.461	19.375	21.882	20.339	21.163	21.986	25.137	24.076	21.159	250.935	18.150	36.746	56.357	75.818	94.817	116.699	136.961	157.640	180.110	202.022	225.744	250.935	1.551.999
6		Sumatera Barat	4.642	5.969	5.389	6.187	5.019	5.847	5.912	6.161	5.913	6.005	6.213	7.758	71.015	5.133	5.073	4.776	7.093	5.019	5.847	5.912	6.154	5.920	6.005	6.213	7.870	71.015
7		Riau	4.693	5.756	7.128	5.662	10.882	10.532	5.405	11.471	8.673	9.006	7.452	13.605	100.265	7.695	2.754	7.128	5.662	10.882	10.532	5.405	11.471	8.641	9.006	7.452	13.605	100.233
8		Jambi	2.784	2.837	4.688	3.602	4.048	4.299	3.602	3.236	5.408	4.317	3.646	6.271	48.738	3.129	3.161	3.498	3.602	3.953	3.902	5.465	5.210	4.853	4.828	4.832	4.890	51.323
9		Sumatera Selatan	10.775	8.614	10.372	10.665	11.060	12.427	7.674	12.568	11.806	10.547	16.816	19.866	143.190	10.775	8.614	10.372	10.813	11.660	12.727	1.318	13.947	15.358	10.847	16.856	19.903	143.190
10		Bengkulu	1.341	1.471	1.808	2.052	2.212	1.629	2.726	2.027	4.269	2.513	2.512	2.891	27.451	1.341	1.471	1.808	2.052	2.212	1.629	2.726	2.027	4.269	2.513	2.512	2.891	27.451
11		Lampung	8.313	8.622	9.010	8.159	12.266	9.053	9.469	8.630	10.407	12.541	13.195	11.341	121.006	8.505	8.820	9.191	8.479	12.159	10.902	8.119	9.105	10.473	12.756	13.452	11.842	123.803
12		Kepulauan Bangka Belitung	1.352	1.352	2.675	930	1.132	3.262	1.125	1.305	2.931	1.494	2.319	1.904	21.781													0
13		Kepulauan Riau	2.851	3.010	3.835	3.972	3.531	3.820	3.889	3.835	4.077	3.808	4.392	4.463	45.483	3.125	3.469	3.488	3.765	3.548	3.822	3.831	3.891	4.108	3.895	4.352	4.189	45.483
14		DKI Jakarta	17.234	16.531	20.940	11.864	18.554	11.473	20.282	7.218	6.601	22.841	6.625	18.189	178.352	17.658	16.657	20.950	16.006	14.561	17.387	13.948	14.394	13.916	14.443	14.553	16.840	191.313
15		Jawa Barat	55.034	55.585	59.157	60.145	56.406	60.355	60.448	56.455	61.316	65.602	62.184	73.474	726.161	58.291	55.290	59.180	59.261	55.798	59.384	61.287	59.758	61.993	62.929	59.943	73.045	726.159
16		Jawa Tengah	29.480	33.199	39.908	33.991	41.650	37.080	31.648	36.763	43.607	34.583	35.358	49.425	446.692	35.169	34.242	34.787	36.627	37.403	38.400	34.364	39.494	37.543	36.639	36.592	45.432	446.692
17		DI Yogyakarta	2.146	2.876	2.723	2.584	2.972	2.422	3.048	3.019	2.867	1.056	4.352	2.529	32.594	2.574	2.526	2.903	2.759	3.048	2.650	2.754	2.826	2.733	2.750	2.716	2.357	32.596
18		Jawa Timur	29.808	31.371	46.091	33.892	28.899	48.423	31.813	30.338	51.098	32.719	40.903	54.946	460.301	36.015	35.945	37.325	38.216	38.010	36.700	37.861	38.821	38.927	39.609	42.202	40.368	459.999
19		Banten	13.860	18.130	15.321	16.938	16.850	17.672	15.579	19.537	18.706	18.495	20.724	21.245	213.057	31.990	9.286	6.035	16.938	16.850	17.672	15.579	19.537	18.706	18.495	20.724	21.245	213.057
20		Bali	4.452	4.719	4.918	5.292	4.370	5.356	4.920	5.345	4.845	5.136	5.003	5.101	59.457	4.452	4.780	5.123	5.090	4.616	5.133	4.847	5.336	4.845	5.136	5.003	5.096	59.457
21		Nusa Tenggara Barat	5.728	5.425	5.801	6.173	5.950	5.883	5.183	5.776	6.353	5.868	6.322	6.503	70.965	5.758	5.451	5.865	6.101	5.860	5.586	5.522	5.759	6.370	6.098	6.192	6.403	70.965
22		Nusa Tenggara Timur	5.942	2.422	2.840	3.423	4.538	5.484	4.778	3.426	10.731	4.551	5.575	7.958	61.668	6.176	8.364	11.165	14.588	19.223	24.707	28.927	32.353	42.650	47.201	50.552	61.667	347.573
23		Kalimantan Barat	4.484	4.786	5.007	4.807	5.041	4.736	4.824	5.241	4.925	5.455	5.490	5.806	60.602	4.484	4.786	5.007	4.807	5.041	4.736	4.824	5.241	4.925	5.455	5.490	5.806	60.602
24		Kalimantan Tengah	2.380	2.393	2.554	2.528	2.365	2.656	3.339	2.770	2.351	2.441	2.769	4.300	32.846													0
25		Kalimantan Selatan	3.855	4.061	4.118	3.714	4.490	4.222	4.157	4.258	4.238	3.519	4.580	5.195	50.407	3.855	4.061	4.118	3.714	3.714	8.712	4.157	4.258	8.496	3.519	4.580	5.195	58.379
26		Kalimantan Timur	3.423	4.252	3.962	3.989	4.490	4.239	4.527	4.150	4.146	4.702	5.135	5.269	52.284	3.423	7.675	11.637	15.626	20.116	24.355	28.882	33.032	37.178	41.880	47.015	52.284	323.103
27		Kalimantan Utara	766	788	903	577	1.076	880	957	801	664	1.146	1.129	1.307	10.994													0
28		Sulawesi Utara	1.332	1.368	1.689	1.443	2.048	1.453	1.393	1.399	1.852	4.178	3.208	2.351	23.714	1.406	2.700	4.373	5.816	7.854	9.307	10.968	12.097	13.947	18.155	21.363	23.714	131.700
29		Sulawesi Tengah	2.516	2.446	2.715	2.430	2.042	1.925	3.330	2.296	2.273	2.673	4.207	9.156	38.009	2.770	3.054	3.015	2.944	3.140	3.132	3.093	3.349	3.305	3.609	3.617	3.501	38.529
30		Sulawesi Selatan	9.495	9.185	9.642	9.428	11.362	9.983	10.251	10.473	10.450	10.898	10.524	10.351	122.042													0
31		Sulawesi Tenggara	2.166	2.104	2.330	2.481	2.107	3.023	2.389	2.394	3.545	3.493	3.661	6.967	36.660	2.626	2.892	2.947	3.030	3.100	3.000	2.899	3.061	3.250	3.264	3.453	3.156	36.678
32		Gorontalo	852	627	1.233	1.248	1.483	1.117	969	531	1.379	1.081	2.535	1.793	14.848	852	1.479	2.691	3.939	6.704	6.539	7.508	8.039	9.418	10.499	13.034	14.848	85.550
33		Sulawesi Barat	1.281	1.347	975	1.884	1.512	1.469	1.478	978	1.068	865	3.087	1.320	17.264													0
34		Maluku	1.338	1.365	1.262	1.308	819	1.746	1.181	1.215	1.005	1.115	2.913	2.305	17.572													0
35		Maluku Utara	1.122	978	1.627	1.760	1.090	1.792	1.372	1.418	1.429	1.192	1.336	1.927	17.043	1.289	2.100	3.727	5.487	6.577	8.369	9.741	11.159	12.588	13.780	15.116	17.043	106.976
36		Papua	466	395	710	497	959	596	699	795	771	1.096	662	957	8.603	466	395	714	493	959	596	699	795	771	1.096	662	957	8.603
37		Papua Barat	170	148	205	402	208	138	250	426	271	130	452	195	2.995	247	318	523	925	1.133	1.019	1.312	1.895	2.164	2.296	2.269	2.942	17.043
38		Papua Tengah	132	114	163	170	121	166	86	84	45	32	49	498	1.660													0
39		Papua Selatan	233	231	207	229	158	50	653	340	225	217	2	773	3.318													0
40		Papua Pegunungan	26	68	54	66	18	58	15	31	40	114	36	134	660													0
41		Papua Barat Daya	377	403	139	30	53	126	188	312	223	208	164	312	2.535													0

Hasil Verifikasi

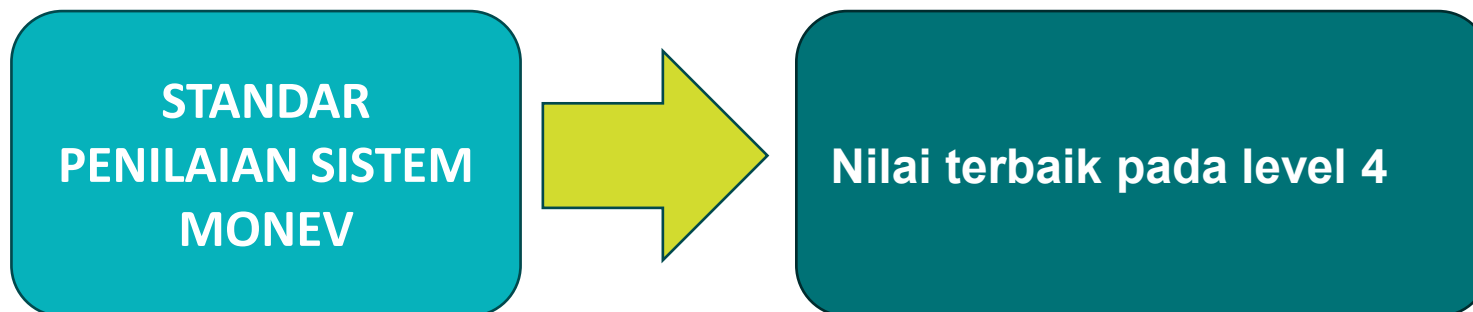


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Variabel	Provinsi	Cakupan Data Program Yang Tersedia di Dinkes Provinsi 2022	Cakupan Data Program Yang Tersedia di Kantor Pusat 2022	Faktor Verifikasi	Hasil Faktor Verifikasi	Kelengkapan Data Yang Tersedia di Dinkes Provinsi	Hasil Kelengkapan Data Yang Tersedia di Dinkes Provinsi	Kelengkapan Data Yang Tersedia di Kantor Pusat	Hasil Kelengkapan Data Yang Tersedia di Kantor Pusat
1										
2	Kunjungan Ibu Hamil (K6)	Aceh	68069	62400	109,08	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
3		Sumatera Utara	1551999	250935	618,49	Underreporting	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
4		Sumatera Barat	71015	71015	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
5		Riau	100233	100265	99,97	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
6		Jambi	51323	48738	105,30	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
7		Sumatera Selatan	143190	143190	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
8		Bengkulu	27451	27451	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
9		Lampung	123803	121006	102,31	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
10		Kepulauan Bangka Belitung	0	21781	0,00	Overreporting	0,00	Kualitas Belum Baik	100,00	Kualitas Baik
11		Kepulauan Riau	45483	45483	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
12		DKI Jakarta	191313	178352	107,27	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
13		Jawa Barat	726159	726161	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
14		Jawa Tengah	446692	446692	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
15		DI Yogyakarta	32596	32594	100,01	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
16		Jawa Timur	459999	460301	99,93	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
17		Banten	213057	213057	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
18		Bali	59457	59457	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
19		Nusa Tenggara Barat	70965	70965	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
20		Nusa Tenggara Timur	347573	61668	563,62	Underreporting	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
21		Kalimantan Barat	60602	60602	100,00	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
22		Kalimantan Tengah	0	32846	0,00	Overreporting	0,00	Kualitas Belum Baik	100,00	Kualitas Baik
23		Kalimantan Selatan	58379	50407	115,82	Underreporting	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
24		Kalimantan Timur	323103	52284	617,98	Underreporting	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
25		Kalimantan Utara	0	10994	0,00	Overreporting	0,00	Kualitas Belum Baik	100,00	Kualitas Baik
26		Sulawesi Utara	131700	23714	555,37	Underreporting	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
27		Sulawesi Tengah	38529	38009	101,37	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik
28		Sulawesi Selatan	0	122042	0,00	Overreporting	0,00	Kualitas Belum Baik	100,00	Kualitas Baik
29		Sulawesi Tenggara	36678	36660	100,05	Akurat	100,00	Kualitas Baik	100,00	Kualitas Baik

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI



- Proses penilaian sistem monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menjawab serangkaian pertanyaan dalam bentuk check list yang mencakup 6 aspek penilaian yang akan dijelaskan secara rinci.
- 6 aspek yang dinilai meliputi:
 - 1) **Struktur, Fungsi dan Kapasitas dalam Pemantauan dan Evaluasi**
 - 2) **Indikator dan Pedoman Pelaporan**
 - 3) **Pengumpulan Data dan Ketersediaan Formulir**
 - 4) **Pengolahan dan Analisis Data**
 - 5) **Pemanfaatan Data dan Informasi**
 - 6) **Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Laporan**





Komponen Penilaian Sistem Pemantauan		Keterangan jawaban
		Tidak /Sebagian/ Semua
A. Struktur, Fungsi dan Kapasitas dalam Pemantauan dan Evaluasi		
1	Apakah terdapat satuan kerja dengan uraian tugas pengumpulan data, pengolahan data, validasi dan pelaporan? (tunjukkan bukti)	
2	Apakah staff yang bertugas untuk pengumpulan data, pengolahan data, validasi dan pelaporan dianggap sudah memadai?	
3	Apakah tersedia Standard Operating Procedure (SOP) bagi petugas untuk melakukan pengumpulan data/pengolahan data/validasi/pelaporan? (tunjukkan bukti)	
4	Apakah pernah dilakukan peningkatan kapasitas (pelatihan, workshop, pembekalan, dll) terkait manajemen data bagi staff yang melakukan pengumpulan data, pengolahan data, validasi dan pelaporan? Catatan : maksimal pelatihan dilaksanakan 3 tahun sebelumnya)	



B. Indikator dan Pedoman Pelaporan

1	Apakah tersedia definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data untuk data yang dikumpulkan?	
2	Apakah tersedia pedoman/petunjuk teknis pengumpulan data, pengolahan data, validasi dan pembuatan laporan? (tunjukkan bukti) Catatan : menunjukkan bhw pedoman ada di website, dihitung ada	
3	Apakah data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan definisi operasional dalam pedoman/petunjuk teknis?	
4	Sebelum dikirim apakah laporan dinilai/dicek oleh atasan langsung? (sebutkan cara penilaian/pengecekan atasan langsung)	

C. Pengumpulan Data dan Ketersediaan Formulir

1	Apakah tersedia formulir pencatatan/pelaporan data? (tunjukkan bukti)	
2	Apakah tersedia pedoman/petunjuk teknis pengisian formulir pencatatan/pelaporan? (tunjukkan bukti)	
3	Apakah pengisian formulir pencatatan/pelaporan sudah sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis?	
4	Apakah terdapat identitas petugas dan waktu pengisian formulir? Probing : jika sudah elektronik, apakah tercatat waktu pengisian, apakah user digunakan bersama? Pada aplikasi pencatatan/pelaporan data (contohnya sismal) sudah terdapat identitas pengguna (user) dan waktu input data yang tercatat pada sistem	



D. Pengolahan dan Analisis Data		
1.	Apakah tersedia panduan dan prosedur untuk pengolahan data? (tunjukkan bukti)	
2	Apakah tersedia panduan analisis data? (tunjukkan bukti) contoh panduan analisis data : di dalam buku pedoman, misalnya pedoman KIA di dalamnya terdapat cara untuk menganalisis data	
3	Apakah analisis data sudah dilakukan sesuai dengan panduannya?	
4	Apakah sudah pernah dilakukan pelatihan analisis data bagi staf pengelola data? Pelatihan/workshop/pembekalan dilaksanakan maksimal 3 tahun terakhir Probing : pelatihan bisa diubah menjadi peningkatan kapasitas (pelatihan, workshop, pembekalan, dll) lingkup peningkatan kapasitas analisis data yang dimaksud termasuk analisis sederhana dan analisis lanjut, misalnya materi mengenai cara pembuatan grafik atau tabel data	



E. Pemanfaatan Data dan Informasi

1	Apakah data/informasi digunakan pada pertemuan-pertemuan koordinasi (misalnya internal, lintas program, lintas sektor)?	
2	Apakah informasi (hasil data rutin yang diolah dan dianalisis) dipublikasi pada masyarakat atau pemangku kepentingan? (lampirkan bukti publikasi jika ada)	
3	Apakah terdapat umpan balik dari data/informasi yang dilaporkan/dipublikasi?	
4	Apakah sistem pencatatan dan pelaporan sudah terintegrasi (terhubung secara langsung) dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah/Nasional?	

F. Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Laporan

1	Apakah laporan yang dilaporkan lengkap, sesuai dengan jenis formulir pelaporan yg tertera dalam standar (puskesmas menggunakan format pelaporan sesuai SIP, Dinkes menggunakan format pelaporan standar masing-masing program)	
2	Apakah data di setiap jenis laporan terisi dengan lengkap?	
3	Apakah pelaporan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan?	
4	Apakah ada tindak lanjut jika data yang dilaporkan tidak lengkap?	



DQA_Output Monitoring dan Evaluasi

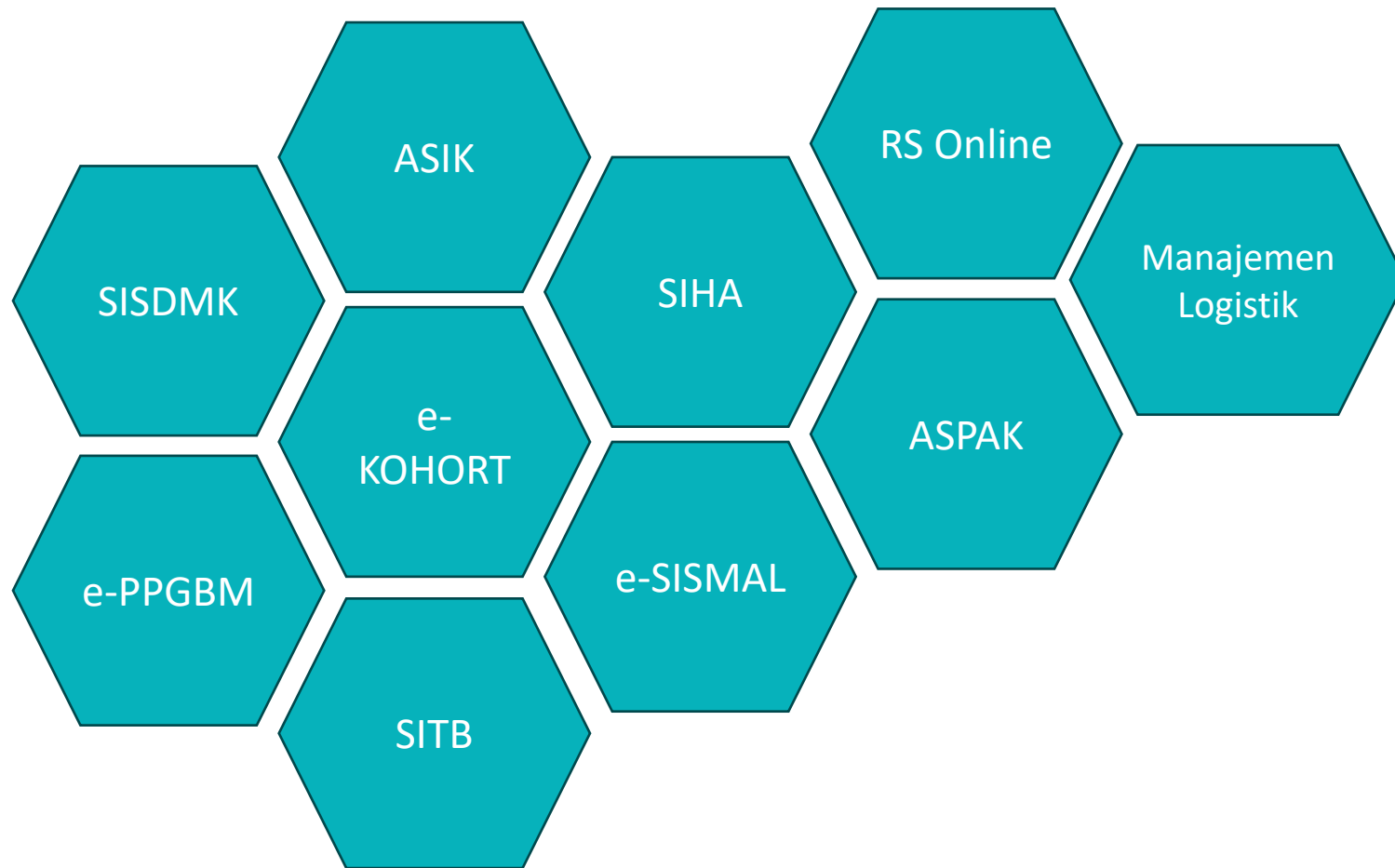


Spider Chart Penilaian Sistem Monitoring dan Evaluasi



PENILAIAN KUALITAS DATA INDIVIDU

Sistem dengan Data Individu

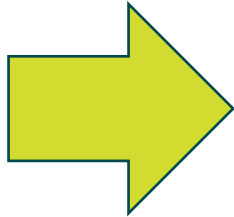


STANDAR PENILAIAN KUALITAS DATA INDIVIDU



Dimensi penilaian data individu

- Keunikan
- Kelengkapan
- Akurasi
- Validitas



- $\geq 90\%$: Kategori Baik
- 80-89%: Kategori Sedang
- $< 80\%$: Kategori Kurang

1) Keunikan

2) Kelengkapan

3) Akurasi

4) Validitas

- Data dinilai unik ketika tidak ada data satu individu/entitas yang direkam lebih dari satu kali berdasarkan variabel unik hal itu diidentifikasi.

No	Nama	NIK*
1	Hendri Taulany	3502100204900002
2	Anggia Sukmawati	3690012502890003
3	Dini Sukacita	3790032502870005
4	Fitra Ramadhani	3690012502890003

NIK
sama
padahal
individu
berbeda

1) Keunikan

2) Kelengkapan

3) Akurasi

4) Validitas

- Proporsi data disimpan terhadap potensi 100% lengkap.
- Kelengkapan diukur dengan menghitung berapa persentase variabel wajib yang terisi dari seluruh variabel yang seharusnya (wajib) diisi.

No	Variabel	Nilai
1	id_tb_03 (kode faskes)*	
2	Nama *	Hendri Taulany
3	NIK*	3402011807890003
4	Tanggal lahir *	18/07/2023

kosong

1) Keunikan

2) Kelengkapan

3) Akurasi

4) Validitas

- Akurasi dapat dinilai dengan melihat proporsi variabel yang terisi dengan benar sesuai formatnya dari seluruh variabel yang terisi.

No	Variabel	Keterangan	Nilai
8	Alamat lengkap pasien*	Teks	Jalan Mawar No. 12
9	Tanggal pengukuran	dd/mm/yyyy	11/20/2022
10	Tinggi Badan	cm	0,72

1) Keunikan

2) Kelengkapan

3) Akurasi

4) Validitas

- Validitas merupakan kesesuaian antar variabel yang terkait (berhubungan dengan logical check pada data)

No	Variabel	Nilai
1	Nama Desa/Kelurahan*	
2	Pos imunisasi*	Puskesmas Wangi-Wangi Selatan
3	Nama Bayi*	Nicholas Saputra
4	NIK*	3505030204220001
5	Tanggal lahir*	02/04/22
Jenis Imunisasi		
6	CAMPAK RUBELLA (MR)	yes
7	Tanggal imunisasi CAMPAK RUBELLA (MR)	09/28/22

Usia bayi adalah 5 bulan, padahal campak diberikan pada usia bayi 9 bulan

PENINGKATAN KUALITAS DATA

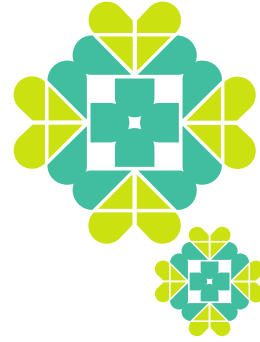


Jika suatu set data belum memenuhi standar baik maka set data tersebut harus diupayakan untuk dapat memenuhi standar kualitas data tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data diantaranya:

1. Melakukan klarifikasi data ke sumber data misalnya dinas kabupaten/kota atau puskesmas
2. Melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.

Harapan



Data yang berkualitas dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan yang tepat untuk penyusunan kebijakan di bidang kesehatan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan unit program kesehatan dapat memahami konsep penilaian kualitas data, sehingga data-data kesehatan ke depannya akan memiliki kualitas yang lebih baik



Kemenkes

Sekretariat Jenderal

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950



@KemenkesRI; @lifeatkemenkes



www.kemkes.go.id



Kementerian Kesehatan RI

